

Analisis Pengaruh Pendapatan, Belanja, dan Kemandirian Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah: Studi pada Provinsi Sulawesi Selatan

Muh. Yusril Amal Syaputra^{1*}, Citra Ayni Kamaruddin², Regina³,
Muhammad Imam Ma'ruf⁴, Diah Retno Dwi Hastuti⁵

^{1*,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
Indonesia.

Email: muhyusrilamalsyaputra@gmail.com^{1*}, citraayni@unm.ac.id², regina@unm.ac.id³,
muhammadimamaruf@unm.ac.id⁴, diah.retno@unm.ac.id⁵

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan kemandirian fiskal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Fluktuasi pendapatan, pola belanja, dan tingkat ketergantungan fiskal dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan time series waktu tahunan 2010–2024. Kinerja keuangan diukur melalui rasio pertumbuhan, sedangkan variabel independen diambil dari indikator keuangan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel memberikan pengaruh berbeda terhadap kinerja keuangan, terutama melalui efektivitas belanja, kapasitas pendapatan, dan tingkat kemandirian fiskal. Temuan ini menegaskan pentingnya meningkatkan kemandirian fiskal dan mengoptimalkan belanja produktif dalam rangka memperkuat keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Pendapatan Regional; Pengeluaran; Kemandirian Fiskal; Kinerja Keuangan; APBD.

Abstract. This study analyzes the influence of regional revenue, regional expenditure, and fiscal independence on the financial performance of the South Sulawesi Provincial Government. Fluctuations in revenue, expenditure patterns, and the level of fiscal dependency over the last ten years indicate the dynamics of regional financial management. The study uses a quantitative approach with annual time-series data from 2010–2024. Financial performance is measured through the growth ratio, while the independent variables are derived from the Regional Budget (APBD) financial indicators. The results show that each variable has a different influence on financial performance, mainly through expenditure effectiveness, revenue capacity, and the level of fiscal independence. These findings emphasize the importance of increasing fiscal independence and optimizing productive spending in order to strengthen the sustainability of regional financial management.

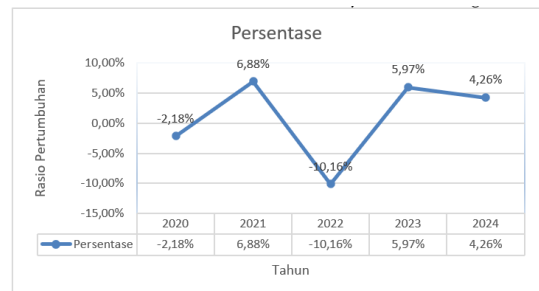
Keywords: Regional Revenue; Expenditure; Fiscal Independence; Financial Performance; APBD.

Pendahuluan

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya publik secara efisien, efektif, dan akuntabel. Di Provinsi Sulawesi Selatan, dinamika pengelolaan keuangan daerah menunjukkan fluktuasi pada komponen pendapatan, belanja, serta tingkat kemandirian fiskal. Perubahan pada realisasi pendapatan daerah mencerminkan kapasitas fiskal yang belum stabil, sementara pola belanja daerah yang berubah-ubah mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan pembangunan. Selain itu, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri masih terbatas. Hal ini berimplikasi pada kemampuan daerah dalam mendukung layanan publik dan pembangunan jangka panjang. Data rasio pertumbuhan keuangan Sulawesi Selatan selama periode 2020–2023 memperlihatkan dinamika fluktuatif yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, rasio pertumbuhan tercatat sebesar -2,18%, namun pada tahun 2021 menunjukkan pemulihan yang signifikan hingga 6,88%, tetapi terjun tajam menjadi -10,16% pada tahun 2022.

Kemudian, pada tahun 2023, rasio pertumbuhan kembali naik menjadi 5,97 dan terakhir menurun sebesar 4,26%. Fluktuasi tajam, terutama penurunan drastis di tahun 2022, menandakan adanya ketimpangan dalam stabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fenomena ini menunjukkan beberapa pertanyaan mendasar bagi penulis, salah satunya adalah bagaimana kinerja keuangan yang terjadi pada daerah Sulawesi Selatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masalah ini semakin dipertegas dengan laporan terbaru Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan tajam, yaitu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah turun dari 24,51% pada triwulan I tahun 2024 menjadi hanya 17,53% pada triwulan I tahun 2025. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai belanja publik secara mandiri

semakin terbatas dan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat (Bank Indonesia, 2025).



Gambar 1. Rasio Pertumbuhan Keuangan daerah Sulawesi Selatan Periode 2020-2024

Fluktuasi tajam, terutama penurunan drastis di tahun 2022, menandakan adanya ketimpangan dalam stabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fenomena ini menunjukkan beberapa pertanyaan mendasar bagi penulis, salah satunya adalah bagaimana kinerja keuangan yang terjadi pada daerah Sulawesi Selatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masalah ini semakin dipertegas dengan laporan terbaru Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan tajam, yaitu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah turun dari 24,51% pada triwulan I tahun 2024 menjadi hanya 17,53% pada triwulan I tahun 2025. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai belanja publik secara mandiri semakin terbatas dan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat (Bank Indonesia, 2025). Secara teoretis, kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan tingkat kemandirian fiskal. Keynes (1936) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting dalam permintaan agregat yang dapat memengaruhi perekonomian melalui identitas pendapatan nasional $Y = C + I + G + X - M$. Pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat mendorong aktivitas ekonomi dan memperbaiki kapasitas fiskal daerah (Putri & Mutiarin, 2023; Azwar, 2016). Di sisi lain, pendapatan daerah menjadi dasar bagi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting yang mencerminkan kapasitas daerah dalam menghasilkan penerimaan tanpa bergantung

pada transfer pusat (Saputra & Darwanis, 2014). Kemandirian fiskal merupakan aspek penting lain dalam menilai pengelolaan keuangan daerah. Menurut Syarifah dalam Kresnandra (2023), rasio kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik dengan meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Teori desentralisasi fiskal juga menekankan bahwa pendelegasian kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah dapat mendorong efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2009; Ebel & Yilmaz, 2002). Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan penerimaan dan belanja diharapkan mampu menyediakan layanan publik yang lebih responsif dan efektif. Dalam perspektif federalisme fiskal, Oates (1972) menegaskan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Berdasarkan fenomena permasalahan pengelolaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak maksimal saat ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kinerja keuangan agar dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan Sulsel. Meskipun banyak penelitian yang membahas kinerja keuangan daerah, sebagian besar studi cenderung berfokus pada hubungan pendapatan atau belanja terhadap pertumbuhan ekonomi atau pada analisis parsial terhadap rasio tertentu. Kesenjangan penelitian muncul karena masih terbatasnya kajian yang secara simultan menganalisis pendapatan daerah, belanja

daerah, dan kemandirian fiskal terhadap kinerja keuangan pada satu wilayah secara longitudinal. Selain itu, penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih jarang dilakukan secara komprehensif berdasarkan rasio pertumbuhan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana variabel-variabel utama penyusun APBD berkontribusi terhadap kinerja keuangan daerah. Pendapatan yang kuat, belanja yang produktif, dan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi strategis bagi penguatan tata kelola fiskal daerah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan data *time series* selama periode 2010–2024. Analisis dilakukan untuk menguji pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan kemandirian fiskal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan, sedangkan kemandirian fiskal dihitung dengan menggunakan rasio PAD terhadap total *pendapatan*. Sebelum melakukan regresi, penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selain itu, uji F dan uji t digunakan untuk menguji hipotesis, sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Seluruh analisis dilakukan menggunakan bantuan aplikasi statistik. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membentuk deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif dapat menyelidiki kedudukan fenomena atau faktor dan melihat hubungan antar satu faktor dengan lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2014-2024.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014-2024.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0,85 dengan nilai probabilitas $0,65 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai probabilitas Obs*R-Squares sebesar 0,53 ($>0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji heterokedastisitas sudah terpenuhi atau lolos uji heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil uji nilai autokorelasi diketahui bahwa nilai Obs*R-Squared sebesar 0,10 ($>0,05$) maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi.

Uji t

Uji t digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat:

- 1) Pendapatan daerah (PD) memiliki nilai Prob. (sig) $< \alpha$ yaitu $0,00 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan Pendapatan Daerah (PD) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan atau dapat diartikan H0 ditolak dan H1 diterima.

- 2) Belanja Daerah (BD) memiliki nilai Prob. (sig) $< \alpha$ yaitu $0,02 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan Belanja Daerah (BD) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan atau dapat diartikan H0 ditolak dan H1 diterima.
- 3) Rasio Kemandirian Daerah (KF) memiliki nilai Prob. (sig) $< \alpha$ yaitu $0,00 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan Rasio Kemandirian Daerah (KF) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan atau dapat diartikan H0 ditolak dan H1 diterima.

Uji F

Uji simultan digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, serta untuk menilai apakah model regresi yang dibangun memiliki signifikansi atau tidak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan (KU) secara simultan dipengaruhi oleh Pendapatan Daerah (PD), Belanja Daerah (BD), dan Rasio Kemandirian Daerah (KF).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai Adjusted R-Square sebesar 0,55 yang berarti bahwa Pendapatan Daerah (PD), Belanja Daerah (BD), dan Rasio Kemandirian Daerah (KF) mampu menjelaskan 55,3% variasi yang terjadi pada Kinerja Keuangan (KU), sedangkan 45,97% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

No	Variabel Independen	TH	B	T _{hit}	Sig
1	PD	-	-114,08	-3,39	0,00
2	BD	+	87,03	2,66	0,02
3	KF	-	-185,47	-3,11	0,00
Intersep					348,67
F hit					6,77
R ²					0,55
Prob. Chi-Square (2)					0,10
Prob. Chi-Square (3)					0,53
n					15

Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Daerah (PD) memiliki nilai koefisien sebesar $-114,08$, yang berarti bahwa setiap peningkatan pendapatan daerah sebesar 1% justru diikuti dengan penurunan kinerja keuangan daerah sebesar $114,0817$ satuan, dengan asumsi variabel lain berada pada kondisi tetap. Arah hubungan yang negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan tidak secara otomatis memperbaiki kinerja keuangan. Temuan ini menandakan adanya masalah struktural dalam pola penerimaan daerah, khususnya karena sebagian besar pendapatan masih bersumber dari transfer pemerintah pusat yang tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan fiskal daerah secara mandiri. Temuan ini pada awalnya terlihat kontradiktif karena pendapatan yang lebih besar seharusnya meningkatkan kinerja keuangan. Namun, ketika dikaitkan dengan data empiris bahwa pendapatan daerah dan data kinerja keuangan, pola ini menjadi sangat masuk akal. Selama periode 2010–2024, realisasi pendapatan daerah Sulawesi Selatan memang selalu tinggi (rata-rata pencapaian target 96–98%), tetapi pertumbuhan tahun-ke-tahun (rasio kinerja keuangan) justru fluktuatif dan bahkan negatif pada tahun 2020 ($-2,17\%$) dan 2022 ($-10,16\%$).

Fenomena ini mencerminkan bahwa lonjakan pendapatan total seringkali didorong oleh dana transfer pusat yang bersifat temporer dan tidak berkelanjutan, bukan dari penguatan PAD yang struktural. Ketika transfer melonjak (misalnya pada 2017 dengan pertumbuhan 26,40%), kinerja terlihat baik sementara, tetapi ketika transfer menurun atau basis tahun sebelumnya tinggi (seperti 2022), rasio pertumbuhan langsung terkontraksi meskipun nominal pendapatan tetap besar. Dari sisi teori, hasil penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan Teori New Public Management (NPM) yang menekankan bahwa kinerja sektor publik tidak hanya ditentukan oleh semakin besarnya pendapatan, tetapi sejauh mana pendapatan dikelola secara efisien, akuntabel, dan berbasis kinerja (Hood, 1991). Dengan demikian, peningkatan pendapatan tanpa diikuti reformasi tata kelola fiskal justru berpotensi menciptakan

inefisiensi anggaran. Selain itu, teori Keynes yang menempatkan pemerintah sebagai aktor penting dalam mendorong stabilitas ekonomi juga menunjukkan bahwa pendapatan harus diikuti belanja yang efektif agar berdampak pada kinerja fiskal dan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2020) yang menemukan bahwa peningkatan pendapatan daerah belum tentu memperkuat kinerja keuangan apabila komposisi pendapatan didominasi oleh dana perimbangan dan bukan dari PAD. Berdasarkan pembahasan tersebut, meningkatnya pendapatan daerah belum mampu memperkuat kinerja keuangan Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena struktur penerimaan yang masih rentan, kontribusi PAD yang relatif rendah, serta lemahnya efektivitas anggaran dalam mengonversi pendapatan menjadi peningkatan kinerja fiskal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pendapatan daerah meningkat, hal tersebut tidak serta merta memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan apabila tidak diiringi oleh penguatan kemandirian fiskal dan tata kelola anggaran yang berorientasi pada efisiensi dan hasil.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah (BD) memiliki nilai koefisien sebesar $87,03$, yang berarti bahwa setiap peningkatan belanja daerah sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan daerah sebesar $87,03$ satuan, dengan asumsi variabel lain berada pada kondisi konstan. Arah koefisien yang positif menggambarkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperbaiki kinerja keuangan, terutama apabila belanja dialokasikan secara tepat, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan ekonomi daerah. Secara teoretis, hasil penelitian ini konsisten dengan pemikiran Keynes, yang menyatakan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi (Keynes, 1936). Dalam konteks keuangan daerah, peningkatan belanja pemerintah yang terarah dapat menciptakan stimulus ekonomi, memperkuat daya serap anggaran, dan meningkatkan efisiensi fiskal yang pada akhirnya tercermin dalam

perbaikan kinerja keuangan. Selain itu, pendekatan New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil (*output-oriented budgeting*) juga mendukung temuan ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Utama (2021) yang menemukan bahwa belanja daerah, khususnya belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan belanja daerah memiliki kontribusi signifikan dalam memperbaiki kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah, ketika dialokasikan secara produktif dan transparan, akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan anggaran. Hal ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa belanja daerah tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang menentukan keberhasilan pengelolaan fiskal daerah secara keseluruhan.

Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Kinerja Keuangan

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Rasio Kemandirian Daerah (KF) memiliki koefisien sebesar $-185,47$, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada rasio kemandirian daerah justru menurunkan nilai kinerja keuangan sebesar $185,47$, dengan asumsi variabel lain berada pada kondisi tetap. Arah hubungan yang negatif ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah tidak selalu diikuti oleh perbaikan kinerja keuangan. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, pola ini dapat terjadi karena peningkatan rasio kemandirian lebih banyak disebabkan oleh fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak stabil, sementara kemampuan pengelolaan belanja dan efisiensi fiskal belum mengalami penguatan yang signifikan. Temuan ini menjadi semakin sejalan ketika dikaitkan dengan fakta empiris kemandirian fiskal dan data kinerja keuangan. Meskipun rasio kemandirian fiskal Sulawesi Selatan relatif rendah hingga sedang (rata-rata $50,93\%$), dengan kategori koordinatif selama sebagian besar periode dan hanya konsultatif

pada 2010–2011), belanja daerah tetap mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan kinerja keuangan. Contohnya, pada tahun-tahun dengan pertumbuhan kinerja keuangan tinggi seperti 2017 ($26,40\%$) dan 2011 ($27,23\%$), kemandirian fiskal justru sedang atau rendah (41% dan 63%), tetapi belanja yang terealisasi tinggi berhasil menciptakan efek pengganda yang kuat. Sebaliknya, pada tahun kontraksi kinerja seperti 2020 ($-2,17\%$) dan 2022 ($-10,16\%$), kemandirian fiskal juga rendah (42% dan 54%), namun pemulihan belanja pasca-pandemi langsung diikuti oleh rebound pertumbuhan positif pada 2023–2024 ($5,97\%$ dan $4,26\%$). Fenomena ini menggambarkan realitas bahwa di daerah dengan kemandirian fiskal yang masih terbatas seperti Sulawesi Selatan, belanja daerah—terutama yang bersumber dari dana transfer—menjadi instrumen paling efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan fiskal. Belanja yang tinggi dan terealisasi baik mampu “mengkompensasi” rendahnya PAD dengan menciptakan aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan peredaran uang, dan pada akhirnya memperbesar potensi penerimaan di masa depan. Hal ini terlihat jelas pada fase pemulihan 2021–2024, di mana meskipun kemandirian fiskal masih di kisaran 45% – 54% , pertumbuhan kinerja keuangan kembali positif berkat belanja yang semakin besar dan efisien.

Dari sisi teori, hasil penelitian ini relevan dengan teori Desentralisasi Fiskal, yang menyatakan bahwa pemberian kewenangan fiskal kepada daerah seharusnya diikuti kemampuan daerah untuk mengelola sumber pendapatan secara efektif (Oates, 1999). Namun, dalam praktiknya, banyak daerah masih menghadapi kesenjangan antara kewenangan dan kapasitas fiskal, sehingga kemandirian yang meningkat tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari & Pratama (2021) yang menjelaskan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian fiskal rendah atau sedang cenderung belum mampu mengonversi kenaikan PAD menjadi kinerja keuangan yang lebih baik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan rasio kemandirian belum memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya kontribusi PAD, ketidakstabilan sumber pendapatan daerah, serta belum kuatnya sistem pengelolaan anggaran yang mampu mendorong efisiensi fiskal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan rasio kemandirian perlu diiringi perbaikan kualitas PAD dan tata kelola fiskal agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil estimasi model regresi berganda menunjukkan gambaran yang menarik sekaligus penuh pelajaran. Variabel Pendapatan Daerah (PD) memiliki koefisien sebesar -114,08, Belanja Daerah (BD) sebesar +87,03, sedangkan Rasio Kemandirian Daerah (KF) sebesar -185,47. Dengan kata lain, hanya Belanja Daerah yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sementara Pendapatan Daerah dan Rasio Kemandirian justru menunjukkan arah negatif. Temuan ini tidak serta-merta berarti “pendapatan tinggi itu buruk” atau “kemandirian itu jelek”. Justru sebaliknya, hasil ini mencerminkan realitas struktural yang sering ditemui di banyak daerah di Indonesia. Koefisien negatif pada Pendapatan Daerah (PD) mengindikasikan bahwa selama periode pengamatan, pertumbuhan pendapatan total didominasi oleh dana transfer dari pusat (DAU, DAK, Dana Desa) yang bersifat tidak terprediksi dan cenderung menciptakan inefisiensi alokasi.

Hal ini sejalan dengan temuan Sari dan Adi (2022) serta Halim dan Abdullah (2019) yang menyatakan bahwa ketergantungan tinggi pada transfer sering kali melemahkan kinerja keuangan karena menurunkan insentif daerah untuk berinovasi dan efisien. Setiap kenaikan belanja sebesar 1% mampu meningkatkan kinerja keuangan hingga 87,04 poin. Ini sangat konsisten dengan teori *Keynesian multiplier* (Keynes, 1936) dan perspektif desentralisasi fiskal modern (Dave & Dressler, 2010) bahwa belanja produktif terutama belanja modal dan belanja barang/jasa yang langsung menyentuh masyarakat akan menciptakan efek pengganda

yang memperluas basis ekonomi lokal, meningkatkan aktivitas usaha, dan pada akhirnya menambah penerimaan daerah di masa mendatang. Penelitian Pratama dan Sari (2023) serta Saragih dan Lestari (2021) juga memperkuat temuan ini dengan bukti empiris di berbagai provinsi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan daerah, belanja daerah, dan kemandirian fiskal. Hasil regresi menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kinerja keuangan, dengan koefisien negatif pada Pendapatan Daerah (PD) sebesar -114,08 yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pendapatan 1% justru mengakibatkan penurunan kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Rahman (2020), yang menemukan bahwa ketergantungan pada transfer pemerintah pusat berpotensi menciptakan inefisiensi alokasi dan menghambat inovasi daerah. Sebaliknya, belanja daerah menunjukkan koefisien positif sebesar +87,03, yang berarti setiap kenaikan belanja 1% dapat meningkatkan kinerja keuangan, konsisten dengan pemikiran Keynesian yang menekankan pentingnya belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi. Penelitian oleh Sari & Utama (2021) juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa belanja daerah yang berfokus pada infrastruktur dan layanan publik berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan. Di sisi lain, kemandirian fiskal, yang memiliki koefisien -185,47, menunjukkan bahwa peningkatan rasio kemandirian tidak selalu diikuti oleh perbaikan kinerja keuangan, mencerminkan realitas yang sama dengan penelitian Wulandari & Pratama (2021) yang menyoroti tantangan yang dihadapi daerah dengan kemandirian fiskal rendah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan perlunya penguatan kemandirian fiskal dan pengelolaan belanja yang lebih efisien untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah dan Kemandirian Fiskal Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sementara Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Kemandirian Fiskal Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di beberapa Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah pemerintah daerah perlu segera meningkatkan kemandirian fiskal melalui upaya peningkatan pendapatan asli daerah, seperti pemungutan pajak dan retribusi, serta memperkuat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, pengelolaan belanja daerah harus diprioritaskan pada belanja yang lebih produktif, dan peningkatan realisasi anggaran perlu dimaksimalkan sebagai tolak ukur penilaian pengelolaan fiskal daerah. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk memperluas analisis komparatif antar-daerah, menerapkan model ekonometrika panel, serta menguji dampak belanja modal terhadap indikator kesejahteraan riil seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, dan ketimpangan, guna memperkaya implikasi kebijakan yang lebih konkret dan berbasis bukti. Masyarakat juga diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memanfaatkan layanan pembayaran pajak secara digital yang disediakan pemerintah, serta aktif dalam pengelolaan pembahasan anggaran melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan saluran pengaduan resmi. Partisipasi ini penting agar masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai wajib pajak, tetapi juga sebagai pengawas sosial yang mendorong penggunaan pendapatan daerah secara efektif dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ma'ruf. (2008). Pertumbuhan ekonomi Indonesia: Determinan dan prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55.
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10).
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak pendapatan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291-296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>.
- Auliani, D., Achmad, E., & Parmadi, P. (2024). Analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 12(1), 51-59.
- Azwar, A. (2016). Peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang/jasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*.
- Dave, B., & Dressler, M. (2010). Fiscal decentralization and public service delivery. *Public Finance Review*, 38(2), 231–255.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2019). *Pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian fiskal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons. *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan

- dana perimbangan dan investasi swasta sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 2.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Pratama, R., & Sari, E. (2023). Pengaruh belanja produktif terhadap kinerja keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Anggaran dan Kebijakan Publik*, 11(3), 201–213.
- Rahman, D. (2020). Pengaruh pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 145–156.
- Santi, Y., Prasetyo, A., & Widhi, E. N. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Timur Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 4(2), 37-48. <https://doi.org/10.47709/jap.v4i2.5722>.
- Saputra, R., & Darwanis. (2014). Pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 183–199.
- Saragih, F., & Lestari, W. (2021). Belanja modal dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1), 77–89.
- Sari, D., & Adi, B. (2022). Ketergantungan fiskal dan kinerja pemerintah daerah: Analisis empiris pada provinsi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 4(1), 55–70.
- Sari, M., & Utama, A. (2021). Belanja pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ekonomi Regional*, 6(2), 98–110.
- Wulandari, L., & Pratama, A. (2021). Analisis kemandirian daerah dan dampaknya terhadap kinerja fiskal. *Jurnal Administrasi Daerah*, 8(2), 123–134.
- Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2). <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137>.